

**HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN RUMAH  
SAKIT DAN ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM  
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 44  
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh PARAF : uf

NENI ROSMAENI

NIM : 08.93.0033

kepada  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2010

TESIS

**HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN RUMAH SAKIT DAN ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM  
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit)**

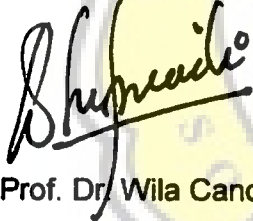
diajukan oleh

**NENI ROSMAENI**

**NIM : 08.93.0033**

telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Wila Candrawila S., SH., CN.

Tanggal .....

T E S I S

**HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN RUMAH  
SAKIT DAN ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM  
(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 44  
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

NENI ROSMAENI

NIM : 08.93.0033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal ..... 2010

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Wila Candrawila S., SH., CN

Anggotan Tim Penguji Lain

  
DR. dr. Tri Wahyu M, Sp.BTKV, MHKes.

  
Yohanes Budi Sarwo, SH., MH.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum  
Tanggal ..... 2010

Prof. DR. Agnes Widanti S., SH., CN.  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur disampaikan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segalanya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Kesehatan pada Program Pascasarjana UNIKA Soegijapranata Semarang.

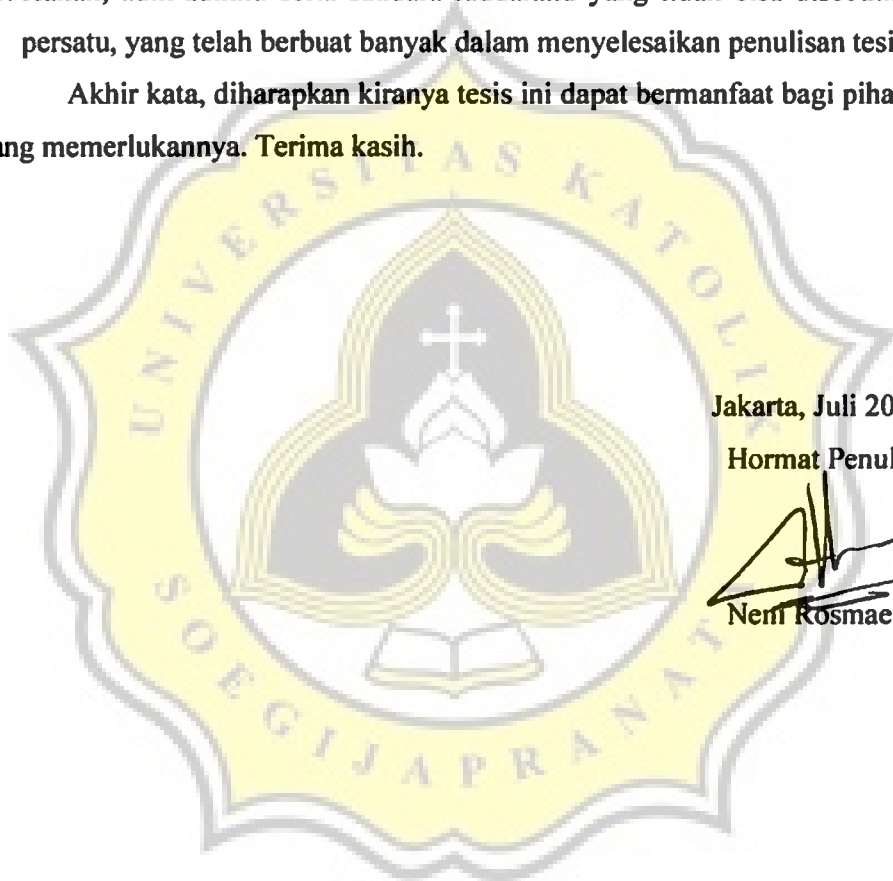
Tesis ini dibuat untuk mendapatkan gambaran hubungan antara hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit dan asas persamaan dimuka hukum. Diharapkan tesis ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi para pihak yang membuat dan yang membaca di kemudian hari.

Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Direktur Program Pasca Sarjana UNIKA Soegijapranata Semarang, DR. A. Rudyanto Soesilo, MSA, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Hukum Kesehatan.**
2. **Ketua Program Studi Hukum Kesehatan, Prof. Dr. Agnes Widanti S. SH, CN.**
3. **Prof. Dr. Wila Chandrawila .S. SH, selaku dosen pembimbing yang tidak kenal lelah membimbing, mengoreksi dan memberi saran-saran guna menyempurnakan tesis ini.**
4. **Dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV, MH.Kes sebagai penguji dalam proses pembuatan Tesis ini, yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berguna bagi perbaikan Tesis ini.**
5. **Budi Sarwo, SH, MH sebagai penguji dalam proses pembuatan Tesis ini, yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berguna bagi perbaikan Tesis ini.**
6. **Seluruh Dosen serta Staf Pengajar Program Studi Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang, yang penulis sebutkan satu persatu.**
7. **Seluruh Staf Tata Usaha Magister Hukum Kesehatan kelas Semarang dan Jakarta.**

8. Semua teman-teman angkatan empat kelas Jakarta Program Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang.
9. Suamiku tercinta Kusnadi yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Anak-anakku terkasih Melani Aprianti, Seno Andrianto, Meta Meilinda dan anak bungsuku Gilang Pamungkas yang gelak tawanya dapat menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kakak, adik-adikku serta saudara-saudaraku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berbuat banyak dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, diharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Terima kasih.



Jakarta, Juli 2010

Hormat Penulis

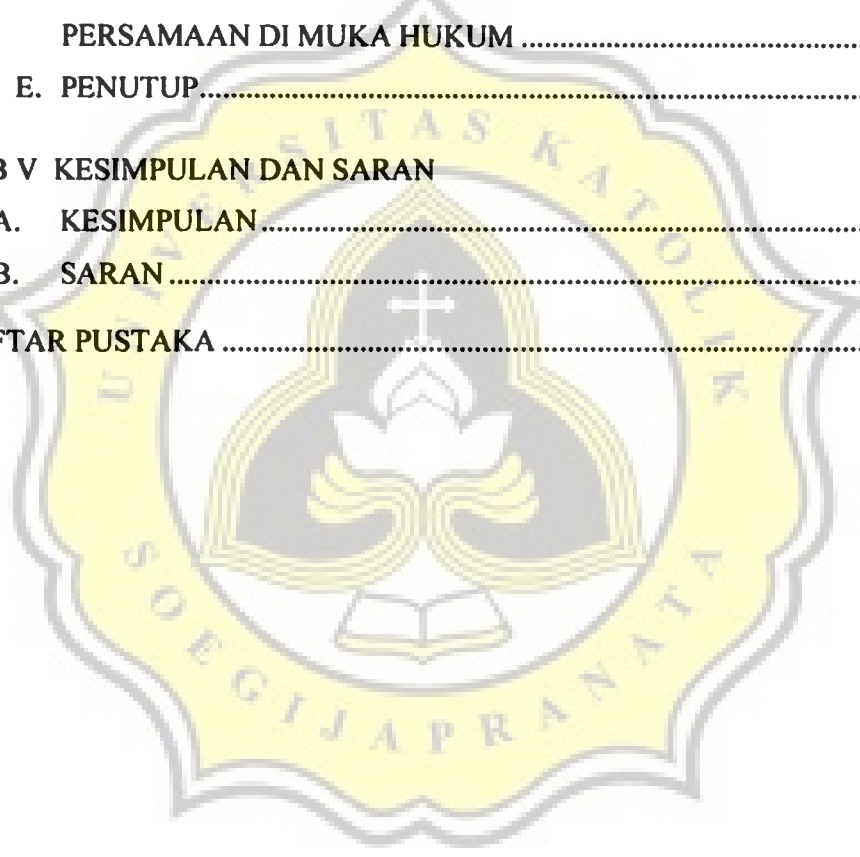
Neni Rosmaeni

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Pernyataan.....	ix
Abstrak .....	x
Abstract.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. METODE PENELITIAN.....	7
1. Spesifikasi Penelitian.....	7
2. Metode Pendekatan .....	8
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	9
1. Jenis Data.....	9
2. Metode Pengumpulan Data .....	10
3. Metode Analisis Data .....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
<b>BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN RUMAH SAKIT</b>	
A. PENGANTAR .....	13
B. HAK DAN KEWAJIBAN .....	14
1. Hukum dan Hak .....	14
2. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	15
C. ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN.....	13

1. Peristilahan dan Pengertian Pelayanan Kesehatan Serta Unsur-Unsurnya .....	13
2. Peristilahan dan Pengertian Hukum Perikatan serta Karakteristik Perikatan.....	21
3. Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien.....	22
D. ASPEK HUKUM HUBUNGAN PASIEN DAN RUMAH SAKIT.....	24
1. Pengertian dan Penggolongan Rumah Sakit .....	24
a. Berdasarkan Jenis Pelayanan .....	24
b. Berdasarkan Penentuan Kelas.....	26
2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit .....	26
3. Hubungan Hukum antara Rumah Sakit dan Dokter.....	28
4. Hubungan Hukum antara Rumah Sakit dan Pasien .....	29
E. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN .....	30
1. Hak Pasien.....	30
2. Kewajiban Pasien.....	33
F. HAK DAN KEWAJIBAN RUMAH SAKIT .....	34
1. Hak Rumah sakit.....	35
2. Kewajiban Rumah Sakit.....	36
G. PENUTUP.....	38
<b>BAB III ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM</b>	
A. PENGANTAR .....	40
B. ASAS HUKUM .....	41
1. Hakikat dan Pengertian Asas Hukum .....	41
2. Penggolongan Asas Hukum .....	44
C. ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM .....	46
1. Hak Asasi Manusia dan Hukum.....	46
2. Aspek Keadilan dalam Hukum .....	52
a. Keadilan Komutatif.....	56
b. Keadilan Distributif.....	57
3. Pengertian dan Unsur-unsur Asas Persamaan Di Muka Hukum .....	59

D. PENUTUP.....	61
<b>BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN RUMAH SAKIT DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM</b>	
A. PENGANTAR .....	63
B. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN RUMAH SAKIT.....	64
C. UNSUR-UNSUR ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM.....	66
D. ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN RUMAH SAKIT DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM .....	68
E. PENUTUP.....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Neni Rosmaeni, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 08.93.0033,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2010



Neni Rosmaeni

## ABSTRAK

Hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum dalam bidang Hukum Harta Kekayaan dikenal sebagai perikatan, yang terbentuk karena undang-undang dan karena perjanjian, selalu berisi hak dan kewajiban timbal balik, begitu pula dalam hubungan hukum antara Rumah Sakit dengan Pasien. Undang-undang Rumah Sakit No. 44/09 menetapkan kewajiban dan hak Rumah Sakit dan Pasien. Di dalam pembentukan hukum dikenal asas persamaan di muka hukum, sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan tentang hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien menyebabkan dilanggarnya asas persamaan di muka hukum?

Penelitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dalam bentuk bahan pustaka, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sehubungan dengan data yang digunakan data kualitatif, maka akan dilakukan analisis kualitatif terhadap ketiga bahan hukum yang dikumpulkan, dan akan dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja.

Undang-Undang Rumah Sakit No. 44/09 dibentuk karena adanya kepastian hukum kebutuhan bagi para pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Namun kenyataannya di dalam UURS itu ditetapkan 20 kewajiban Rumah Sakit dan mengenai kewajiban pasien akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Ditetapkan 18 hak pasien dan 8 hak rumah sakit, artinya terdapat 38 hak pasien dan 8 hak rumah sakit yang telah ditentukan. Penetapan keentuan yang tidak seimbang, akan sangat memberatkan pihak *management* terhadap pengelolaan Rumah Sakit, yang akan menyebabkan biaya pengelolaan rumah sakit sangat tinggi, dan ujung-ujungnya menjadi beban pasien.

Revolusi Prancis dikenal sebagai tonggak dari diakuinya persamaan setiap orang di muka bumi ini di semua bidang, termasuk di dalam bidang hukum, sehingga bentuk diskriminasi apapun dalam bidang apapun harus dihapuskan. Menetapkan kewajiban yang tidak seimbang dengan hak adalah bentuk diskriminasi di muka hukum terhadap subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya.

Kewajiban Rumah sakit yang berjumlah 38 dan hak yang berjumlah 8 dan akan menjadi hak dan kewajiban pasien, menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara kedua subjek hukum rumah sakit dan pasien di muka hukum, sehingga dapat dikatakan ketentuan tentang hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien di dalam Undang-Undang Rumah Sakit No. 44/09 menyebabkan dilanggarnya asas persamaan di muka hukum.

**Kata kunci:** Hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit, unsur-unsur asas persamaan di muka hukum, hubungan antara hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit dan asas persamaan di muka hukum.

## ABSTRACT

Legal relationships between subjects of law with legal subjects in the field of Property Law known as the commitments, which are formed due to the law and because the agreement, always contain reciprocal rights and obligations, similarly in the legal relationship between the Hospital with a Patient. Hospitals Act No. 44/09 imposes the obligation and rights of Hospitals and Patients. In the formation of law recognized the principle of equality before the law, so the question arises whether the provisions concerning the rights and obligations of hospitals and patients led to violation of the principle of equality before the law?

This law of research using descriptive research method with the approach of Juridical Research Methods Normative, so that kind of research is literature study. The data collected is qualitative data in the form of library materials, ie, primary legal materials, secondary and tertiary. In connection with the data used qualitative data, the qualitative analysis will be conducted on the third law of material collected, and the answer will be formulated as hypothesis-shaped work.

Hospitals Act No. 44/09 was formed because of the need legal certainly for all parties involved in health services in hospitals. But in fact it was established 20 Hospital liabilities and obligations patient will be determined later by Regulation of the Minister of Health. Assigned 18 patients and 8 right right hospital, patients rights mean there are 38 hospitals and 8 rights which have been determined. Law determination that become unbalanced, would be very burdensome to the management of hospital management, which will cause the cost of hospital management is very high, and ultimately borne by patients.

The French Revolution was known as a pillar of the recognition of equality of each person on this earth in all fields, including in the field of law, so any form of discrimination in any field should be abolished. Imposes the obligation that is not balanced with the right is a form of discrimination before the law against legal subject one with the other legal subjects.

Liabilities totaling 38 Hospitals and rights which amount to eight and will become the rights and obligations of patients, indicating the absence of equilibrium between the two legal subjects and patients in hospitals before the law, so that the provisions regarding the rights and obligations of hospitals and patients in the Act No Hospital Act. 44/09 cause violation of the principle of equality before the law.

**Keywords:** Rights and obligations of patients and hospitals, the principle elements of equality before the law, the relationship between rights and obligations of patients and hospitals and principles of equality before the law.